OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SIBOLGA

Rifky Hanafiah Pohan
NPP. 33.0106
Program Studi Keuangan Publik
Email: rifkypohan2016@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Robert Simbolon, MPA
Email: robert.simbolon@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This research is motivated by the suboptimal realization of on-street parking retribution revenue in Sibolga City. The research gap lies in the gap between potential and realization, manual administration, weak supervision, and the need to analyze parking retribution as a fiscal instrument for strengthening local own-source revenue.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the optimization of on-street parking retribution revenue in increasing local own-source revenue in Sibolga City.* ***Method:*** *This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving BPKPAD, the Transportation Agency, the Parking UPTD, parking attendants, and related field data.* ***Result:*** *The findings show that the optimization of parking retribution revenue has not been fully achieved. The realization of on-street parking retribution reached only around 36-37 percent of the target during 2022-2024, and its contribution to local own-source revenue remained below one percent. The main inhibiting factors include non-system-based potential data collection, manual reporting, low parking attendant discipline, inconsistent supervision, and the persistence of unofficial parking practices.* ***Conclusion:*** *Optimization requires accurate potential mapping, integrated administration, stronger supervision, consistent law enforcement, digital payment innovation, and controlled cooperation with third parties.*
Keywords: *Local Own-Source Revenue, On-Street Parking, Optimization, Parking Management, Parking Retribution*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Sibolga. Kesenjangan penelitian terletak pada adanya jarak antara potensi dan realisasi penerimaan, sistem administrasi yang masih manual, pengawasan yang belum konsisten, serta kebutuhan untuk menganalisis retribusi parkir sebagai instrumen fiskal daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari BPKPAD, Dinas Perhubungan, UPTD Perparkiran, juru parkir, serta data lapangan yang relevan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi parkir belum berjalan maksimal. Realisasi retribusi parkir tepi jalan umum hanya berada pada kisaran 36-37 persen dari target selama tahun 2022-2024, sedangkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih berada di bawah satu persen. Faktor penghambat utama meliputi pendataan potensi yang belum berbasis sistem, pelaporan yang masih manual, rendahnya kedisiplinan juru parkir, pengawasan yang belum konsisten, serta masih adanya praktik parkir tidak resmi. **Kesimpulan:** Optimalisasi perlu dilakukan melalui pemetaan potensi yang akurat, administrasi yang terintegrasi, pengawasan yang lebih kuat,

penegakan aturan yang konsisten, inovasi pembayaran digital, dan pengendalian kerja sama dengan pihak ketiga.

Kata Kunci: Optimalisasi, Parkir Tepi Jalan Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Parkir, Retribusi Parkir

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, penguatan PAD tidak hanya bergantung pada besarnya potensi ekonomi wilayah, tetapi juga pada kualitas pendataan, pemungutan, pengawasan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018; Halim, 2004).

Retribusi daerah menjadi salah satu komponen PAD yang memiliki karakter langsung karena masyarakat memperoleh jasa atau pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Salah satu bentuk retribusi yang potensial di daerah perkotaan adalah retribusi parkir tepi jalan umum. Retribusi ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian ruang jalan, ketertiban lalu lintas, dan pelayanan transportasi perkotaan. Kajian ekonomi parkir menegaskan bahwa pengelolaan parkir yang baik perlu memperhatikan harga, permintaan, pemanfaatan ruang, dan dampaknya terhadap mobilitas kota (Inci, 2015; Lehner & Peer, 2019).

Kota Sibolga memiliki potensi penerimaan parkir yang cukup besar karena karakter wilayahnya sebagai kota pesisir, pusat perdagangan, dan daerah tujuan wisata. Tingginya aktivitas masyarakat, terutama pada kawasan perdagangan, kuliner, dan wisata, seharusnya dapat mendorong penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum. Akan tetapi, data penerimaan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi penerimaan daerah yang optimal. Kondisi ini terlihat dari capaian retribusi parkir yang dalam beberapa tahun terakhir masih jauh dari target.

Tabel 1.
Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Pertumbuhan (%)	Capaian (%)
2020	88,93	79,53	100	89,43
2021	99,45	76,26	0,95	76,68
2022	118,84	82,39	1,08	69,33
2023	217,42	87,14	1,05	40,08
2024	219,24	86,57	0,99	39,49

Sumber: BPKPAD Kota Sibolga, diolah penulis, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, realisasi PAD Kota Sibolga selama tahun 2020-2024 belum selalu mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Ketimpangan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa perencanaan pendapatan daerah masih perlu diperkuat melalui basis data yang lebih akurat dan evaluasi potensi yang lebih realistis. Kondisi ini menjadi relevan dengan fokus penelitian karena retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung PAD.

Secara lebih spesifik, penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum juga menunjukkan capaian yang belum optimal. Meskipun target tahun 2022-2024 ditetapkan sebesar Rp1.100.000.000, realisasi yang tercapai masih berada pada kisaran Rp399.976.954 sampai Rp411.218.260. Artinya, capaian penerimaan belum mencapai setengah dari target yang telah ditentukan. Ketidakseimbangan tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama bukan hanya

terdapat pada besarnya potensi, tetapi juga pada sistem pengelolaan, pemungutan, pelaporan, pengawasan, dan kepatuhan di lapangan.

Tabel 2.
Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	307.720.000	309.180.000	100,47
2021	382.500.000	296.390.000	77,48
2022	1.100.000.000	399.976.954	36,36
2023	1.100.000.000	411.031.940	37,36
2024	1.100.000.000	411.218.260	37,38

Sumber: BPKPAD Kota Sibolga, diolah penulis, 2026.

Kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap PAD Kota Sibolga juga masih tergolong rendah. Selama tahun 2020-2024, kontribusinya berada pada rentang 0,39 persen sampai 0,49 persen. Angka ini menunjukkan bahwa retribusi parkir belum menjadi sumber PAD yang dominan, meskipun secara lapangan memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui penguatan tata kelola.

Tabel 3.
Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terhadap PAD Kota Sibolga Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2020	309.180.000	79.539.316.412	0,39
2021	296.390.000	76.263.787.133	0,39
2022	399.976.954	82.398.151.034	0,49
2023	411.031.940	87.147.635.427	0,47
2024	411.218.260	86.577.030.313	0,48

Sumber: BPKPAD Kota Sibolga, diolah penulis, 2026.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh temuan lapangan yang menunjukkan masih adanya administrasi manual, ketidakteraturan pemberian karcis, ketidaksesuaian tarif, keterbatasan pengawasan, serta praktik parkir tidak resmi. Dalam konteks kebijakan parkir, system tarif, pengawasan, dan kepatuhan menjadi system penting karena perubahan harga dan tata system parkir dapat memengaruhi permintaan parkir, penerimaan, dan kepuasan pengguna (Pierce & Shoup, 2013; Mo et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian tentang optimalisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Sibolga menjadi penting untuk menjelaskan mengapa potensi yang tersedia belum sepenuhnya mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, terdapat kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan retribusi parkir. Target tahun 2022-2024 sebesar Rp1.100.000.000 belum dapat dicapai karena realisasi hanya berada pada kisaran 36-37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa target penerimaan belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pemungutan dan pengawasan yang mampu menjamin optimalisasi penerimaan.

Kedua, terdapat kesenjangan tata sistem karena pendataan potensi belum sepenuhnya berbasis sistem yang terintegrasi. Pemerintah Kota Sibolga telah menetapkan 30 ruas jalan dan 100 titik parkir, tetapi data rinci mengenai volume kendaraan, intensitas pemakaian, jam puncak, dan potensi harian di setiap titik belum tersedia secara lengkap. Padahal, kajian kebijakan parkir menunjukkan bahwa penentuan tarif dan pengelolaan parkir harus didasarkan pada data permintaan, sistem, dan system pemanfaatan ruang parkir (Lehner & Peer, 2019; Purnomo et al., 2023).

Ketiga, terdapat kesenjangan implementasi karena sistem administrasi dan pelaporan masih dominan manual. Sistem manual berbasis karcis dan setoran langsung menyebabkan pengawasan terhadap transaksi di lapangan belum dapat dilakukan secara real-time. Kondisi ini membuka ruang terjadinya selisih antara potensi penerimaan dengan jumlah setoran yang tercatat. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah, digitalisasi dan sistem informasi dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan data apabila didukung oleh sumber daya manusia dan pengawasan yang memadai (Felani & Suryanata, 2023; Tumija & Ramadhan, 2023).

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena retribusi parkir tepi jalan umum merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan ketertiban lalu lintas. Apabila pengelolaannya tidak optimal, pemerintah daerah tidak hanya kehilangan potensi PAD, tetapi juga menghadapi masalah pelayanan, ketertiban parkir, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemungutan resmi.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Sibolga, khususnya Dinas Perhubungan dan BPKPAD, dalam memperbaiki basis data potensi, sistem pelaporan, pengawasan juru parkir, dan kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian keuangan publik daerah karena menghubungkan optimalisasi pendapatan daerah dengan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum, digitalisasi pemungutan, dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Kajian IPDN mengenai PAD juga menegaskan bahwa penguatan pendapatan daerah membutuhkan pendataan, strategi kelembagaan, pengawasan, kepatuhan, dan pemanfaatan sistem elektronik secara berkelanjutan (Riswati, 2022; Eljawati & Susilawati, 2023; Al Hafiz & Sari, 2024).

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu internasional menunjukkan bahwa pengelolaan parkir memiliki hubungan erat dengan kebijakan tarif, permintaan, ruang jalan, dan penerimaan. Kajian ekonomi parkir menempatkan parkir sebagai instrumen kebijakan perkotaan yang dapat memengaruhi perilaku pengguna kendaraan dan efisiensi ruang kota (Inci, 2015). Kajian meta-analisis tentang elastisitas harga parkir menunjukkan bahwa perubahan tarif dapat memengaruhi permintaan parkir, meskipun dampaknya berbeda menurut lokasi, waktu, dan karakteristik pengguna (Lehner & Peer, 2019).

Penelitian tentang penetapan harga parkir berbasis permintaan di San Francisco menunjukkan bahwa harga parkir yang disesuaikan dengan tingkat okupansi dapat menjadi alat untuk mengelola ruang parkir tepi jalan secara lebih efisien (Pierce & Shoup, 2013). Studi di Nanning, China, juga memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan tarif parkir tepi jalan dapat memengaruhi permintaan dan kepuasan pengguna, sehingga kebijakan tarif perlu mempertimbangkan kondisi aktual lapangan (Mo et al., 2021). Temuan ini relevan dengan Kota Sibolga karena tarif resmi yang telah ditetapkan belum cukup apabila tidak diikuti pengawasan, kepatuhan, dan data potensi yang akurat.

Kajian internasional lainnya menunjukkan bahwa digitalisasi parkir dapat meningkatkan kemampuan pemantauan, efektivitas pembayaran, dan potensi penerimaan. Analisis digitalisasi parkir tepi jalan di pusat kota menunjukkan bahwa sistem digital dapat meningkatkan efisiensi pengawasan pembayaran dan kinerja finansial pengelolaan parkir (Maršanić, 2025). Simulasi tarif parkir tepi jalan di Indonesia juga menunjukkan bahwa penyesuaian tarif berbasis kondisi lapangan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan retribusi daerah (Purnomo et al., 2023).

Penelitian dari lingkungan IPDN memperkuat relevansi kajian ini. Potensi retribusi daerah perlu digali melalui pendataan objek retribusi dan perbaikan tata kelola agar mampu meningkatkan PAD (Eljawati, 2022). E-retribusi pasar tradisional dapat membantu mencegah kebocoran PAD apabila didukung oleh kesiapan sarana, sumber daya manusia, dan pengawasan yang konsisten (Felani & Suryanata, 2023). Pengelolaan pajak daerah juga membutuhkan kebijakan yang jelas, pendataan, pelayanan, dan pengawasan agar penerimaan daerah dapat meningkat (Riswati, 2022).

Kajian IPDN lainnya menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak dapat dilepaskan dari strategi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pemetaan potensi penerimaan daerah (Eljawati & Susilawati, 2023). Kemandirian fiskal daerah juga dipengaruhi oleh optimalisasi sumber PAD, diversifikasi pendapatan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia (Al Hafiz & Sari, 2024). Dalam konteks digitalisasi tata kelola keuangan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat mendukung efektivitas perencanaan apabila data, jaringan, dan pelaksanaan teknis berjalan baik (Tumija & Ramadhan, 2023).

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, posisi penelitian ini berada pada kajian optimalisasi retribusi parkir tepi jalan umum sebagai bagian dari PAD. Perbedaannya terletak pada lokus Kota Sibolga, penggunaan dimensi optimalisasi pendapatan daerah, serta penekanan pada hubungan antara potensi parkir, sistem administrasi manual, pengawasan, penegakan Perda, inovasi digital, dan kebijakan kerja sama pihak ketiga.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menganalisis optimalisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dalam meningkatkan PAD Kota Sibolga dengan menggunakan dimensi optimalisasi penerimaan daerah. Penelitian ini tidak hanya melihat retribusi parkir dari sisi target dan realisasi, tetapi juga menilai proses pendataan potensi, administrasi dan pelaporan, profesionalitas aparatur, penegakan Perda, serta inovasi pemungutan dan pelayanan publik.

Kebaruan lainnya terletak pada konteks Kota Sibolga yang memiliki karakter sebagai kota pesisir, pusat aktivitas ekonomi, dan daerah tujuan wisata, tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap PAD masih berada di bawah satu persen. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya penerimaan bukan disebabkan oleh ketiadaan potensi semata, melainkan oleh masalah implementasi tata kelola seperti data potensi yang belum rinci, sistem manual, keterbatasan pengawasan, kedisiplinan juru parkir, dan belum optimalnya digitalisasi.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus untuk memahami secara mendalam proses optimalisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum berdasarkan kondisi empiris di Kota Sibolga. Pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari fakta lapangan, kemudian menghubungkannya dengan konsep optimalisasi penerimaan daerah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan retribusi parkir, yaitu Dinas Perhubungan Kota Sibolga, UPTD Perparkiran, BPKPAD Kota Sibolga, dan juru parkir. Data sekunder diperoleh dari dokumen target dan realisasi PAD, data retribusi daerah, data retribusi parkir tepi jalan umum, regulasi daerah, dokumen Dinas Perhubungan, dokumen BPKPAD, serta jurnal dan buku yang relevan.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena informan ditentukan berdasarkan pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatannya dalam pengelolaan retribusi parkir. Informan utama meliputi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala UPTD Perparkiran, pejabat BPKPAD, dan juru parkir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan dimensi optimalisasi penerimaan daerah, yaitu pendataan dan penggalian potensi, efektivitas sistem administrasi dan pelaporan, peningkatan

profesionalitas dan kedisiplinan aparatur, penegakan hukum dan Perda, serta inovasi dalam pemungutan dan pelayanan publik (Halim, 2004).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi PAD dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Sibolga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Sibolga belum optimal apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi retribusi parkir mampu melebihi target dengan capaian 100,47 persen. Namun, setelah itu capaian menurun, yaitu 77,48 persen pada tahun 2021, kemudian turun tajam menjadi 36,36 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian berada pada kisaran 37 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan target pada tahun 2022 tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas pemungutan di lapangan.

Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD juga masih rendah. Selama tahun 2020-2024, kontribusinya tidak mencapai satu persen. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi parkir belum memberikan dampak signifikan terhadap struktur PAD Kota Sibolga. Namun, rendahnya kontribusi tersebut tidak dapat langsung diartikan bahwa potensi parkir kecil. Berdasarkan hasil wawancara, potensi parkir tepi jalan umum masih cukup menjanjikan karena aktivitas masyarakat dan kunjungan wisata di Kota Sibolga relatif tinggi. Permasalahan utamanya terletak pada pengelolaan potensi yang belum sepenuhnya efektif.

3.2 Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Berdasarkan Dimensi Halim

Optimalisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dianalisis melalui lima dimensi, yaitu pendataan dan penggalian potensi, efektivitas sistem administrasi dan pelaporan, profesionalitas serta kedisiplinan aparatur, penegakan hukum dan Perda, serta inovasi pemungutan dan pelayanan publik. Ringkasan hasil analisis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.
Ringkasan Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Sibolga

Dimensi	Temuan Utama	Kategori
Pendataan dan penggalian potensi	Telah terdapat 30 ruas jalan dan 100 titik parkir, tetapi data volume kendaraan, jam puncak, dan potensi harian belum terdokumentasi secara rinci.	Belum optimal
Administrasi dan pelaporan	Pemungutan masih manual menggunakan karcis dan setoran langsung, sehingga verifikasi belum real-time dan masih berpotensi menimbulkan selisih data.	Belum efektif
Profesionalitas dan kedisiplinan aparatur	Masih ditemukan juru parkir yang tidak memakai atribut lengkap, tidak memberikan karcis, serta memungut tarif tidak sesuai ketentuan.	Belum optimal
Penegakan hukum dan Perda	Teguran dan pembinaan sudah dilakukan, tetapi sanksi tegas terhadap pelanggaran dan parkir liar belum konsisten.	Belum optimal

Inovasi pemungutan dan pelayanan publik	Terdapat rencana e-parking dan kerja sama dengan pihak ketiga, tetapi digitalisasi belum berjalan penuh dan pengawasan mitra masih perlu diperkuat.	Cukup baik tetapi perlu penguatan

Sumber: Hasil penelitian penulis, diolah, 2026.

3.2.1 Pendataan dan Penggalian Potensi

Pendataan potensi merupakan tahap awal dalam optimalisasi penerimaan retribusi parkir. Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Perhubungan telah menetapkan 30 ruas jalan pelayanan parkir tepi jalan umum dan membaginya ke dalam 100 titik parkir. Langkah ini menunjukkan adanya dasar administratif dalam pengelolaan parkir. Akan tetapi, pendataan belum sepenuhnya berbasis sistem karena belum tersedia data lengkap mengenai jumlah kendaraan per titik, jenis kendaraan, tingkat kepadatan harian, dan jam puncak penggunaan parkir. Akibatnya, penetapan target masih berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan potensi riil di lapangan. Kondisi ini terlihat dari penurunan target tahun 2025 menjadi Rp684.000.000 setelah target tahun 2024 sebesar Rp1.100.000.000 dinilai terlalu tinggi dan kurang realistis.

3.2.2 Efektivitas Sistem Administrasi dan Pelaporan

Sistem administrasi dan pelaporan retribusi parkir di Kota Sibolga masih dilakukan secara manual. Juru parkir menarik retribusi secara langsung kepada pengguna jasa, kemudian menyetorkan hasil pemungutan kepada UPTD Perparkiran atau koordinator sebelum direkap dan dilaporkan kepada Dinas Perhubungan serta BPKPAD. Sistem manual ini memiliki kelemahan karena pencatatan sangat bergantung pada kedisiplinan dan kejujuran petugas lapangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa tidak semua pengguna parkir menerima karcis sebagai bukti pembayaran, sehingga terdapat potensi transaksi yang tidak tercatat secara resmi. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan terhadap sistem digital atau non-tunai agar pelaporan dapat dilakukan lebih transparan dan akuntabel.

3.2.3 Profesionalitas dan Kedisiplinan Aparatur

Profesionalitas dan kedisiplinan juru parkir menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemungutan retribusi. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap, tidak memberikan karcis, tidak selalu hadir di titik parkir, dan memungut tarif yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu membentuk kedisiplinan yang konsisten. Keterbatasan jumlah pengawas juga menyebabkan Dinas Perhubungan belum dapat memantau seluruh titik parkir secara terus-menerus.

3.2.4 Penegakan Hukum dan Perda

Penegakan hukum dan Perda merupakan syarat penting agar pemungutan retribusi berjalan sesuai aturan. Pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum melalui Perda Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, implementasi penegakan aturan masih cenderung mengutamakan pembinaan dan teguran. Sanksi yang lebih tegas seperti pencabutan izin atau pelarangan bertugas masih jarang diterapkan. Selain itu, praktik juru parkir liar masih ditemukan di beberapa titik ramai. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan aturan perlu lebih konsisten agar memberikan efek jera dan memperkuat kepatuhan.

3.2.5 Inovasi dalam Pemungutan dan Pelayanan Publik

Inovasi dalam pengelolaan retribusi parkir telah mulai diarahkan melalui rencana penerapan e-parking dan kerja sama dengan pihak ketiga. Kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga diberlakukan sebagai respons terhadap tidak tercapainya target penerimaan secara berulang.

Melalui skema ini, pihak ketiga bertanggung jawab melakukan pemungutan dan penyetoran ke kas daerah, sedangkan Dinas Perhubungan berperan sebagai pengawas. Meskipun demikian, keberhasilan skema ini tetap bergantung pada kejelasan kontrak, pengawasan lapangan, evaluasi berkala, dan transparansi pelaporan. Digitalisasi juga perlu dipercepat agar sistem pemungutan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada setoran manual.

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung optimalisasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Sibolga meliputi potensi wilayah yang cukup tinggi, aktivitas masyarakat yang padat, keberadaan kawasan perdagangan dan wisata, dasar hukum yang sudah tersedia, serta adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem melalui kerja sama pihak ketiga dan rencana digitalisasi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa secara potensial, retribusi parkir masih memiliki peluang untuk ditingkatkan.

Faktor penghambat meliputi pendataan potensi yang belum rinci, sistem administrasi dan pelaporan yang masih manual, keterbatasan pengawasan, rendahnya kedisiplinan sebagian juru parkir, kurangnya kesadaran masyarakat untuk meminta karcis dan membayar sesuai tarif resmi, serta belum konsistennya penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa masalah utama dalam optimalisasi retribusi parkir lebih banyak terletak pada tata kelola implementasi dibandingkan pada ketiadaan potensi.

3.4 Upaya Pemerintah Kota Sibolga dalam Mengoptimalkan Retribusi Parkir

Upaya Pemerintah Kota Sibolga dalam mengoptimalkan retribusi parkir telah dilakukan melalui pembinaan juru parkir, pengawasan lapangan oleh Dinas Perhubungan, evaluasi penerimaan secara berkala, penyesuaian target agar lebih realistis, serta kebijakan pengalihan pengelolaan kepada pihak ketiga. Langkah-langkah tersebut merupakan respons terhadap rendahnya capaian penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang masih perlu diperkuat adalah pemetaan potensi berbasis data, pembaruan data titik parkir secara berkala, penertiban juru parkir liar, penerapan tarif sesuai Perda, penguatan mekanisme evaluasi pihak ketiga, serta percepatan digitalisasi pembayaran. Dalam jangka panjang, digitalisasi dapat membantu pemerintah daerah memantau transaksi secara lebih cepat, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan transparansi penerimaan. Pengalaman e-retribusi dan sistem informasi keuangan daerah menunjukkan bahwa sistem digital baru efektif apabila didukung sumber daya manusia, jaringan, regulasi teknis, dan pengawasan yang konsisten (Felani & Suryanata, 2023; Tumija & Ramadhan, 2023).

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Sibolga belum berjalan secara maksimal. Realisasi penerimaan masih jauh dari target dan kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa potensi parkir sebenarnya tetap ada karena Kota Sibolga memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi, kawasan ekonomi yang padat, dan daya tarik wisata. Dengan demikian, rendahnya kontribusi retribusi parkir lebih tepat dipahami sebagai masalah tata kelola, bukan semata-mata masalah potensi.

Temuan ini sejalan dengan kajian internasional yang menegaskan bahwa kebijakan parkir perlu didukung oleh data permintaan, sistem tarif yang tepat, pengawasan, dan teknologi pemantauan (Inci, 2015; Maršanić, 2025; Purnomo et al., 2023). Temuan ini juga sejalan dengan kajian IPDN bahwa peningkatan PAD memerlukan pendataan objek pendapatan, pengawasan yang konsisten, peningkatan kapasitas aparatur, dan sistem digital untuk mencegah kebocoran penerimaan (Eljawati, 2022; Felani & Suryanata, 2023; Al Hafiz & Sari, 2024).

Kebijakan pengalihan pengelolaan kepada pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi, tetapi tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang kuat, potensi kebocoran tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, optimalisasi harus dipahami sebagai proses

menyeluruh yang mencakup pendataan, pemungutan, pelaporan, pengawasan, penegakan aturan, digitalisasi, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga belum berjalan secara maksimal. Pemerintah daerah telah memiliki dasar pengelolaan berupa regulasi, penetapan titik parkir, dan mekanisme pemungutan, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek pendataan potensi, administrasi, kedisiplinan aparatur, pengawasan, dan penegakan aturan. Capaian retribusi parkir tahun 2022-2024 hanya berada pada kisaran 36-37 persen dari target dan kontribusinya terhadap PAD masih di bawah satu persen.

Faktor pendukung optimalisasi meliputi tingginya aktivitas masyarakat, posisi Kota Sibolga sebagai daerah tujuan wisata, keberadaan regulasi yang jelas, serta adanya kebijakan perbaikan melalui kerja sama pihak ketiga dan rencana digitalisasi. Faktor penghambat meliputi sistem administrasi yang masih manual, data potensi yang belum rinci, pengawasan yang terbatas, rendahnya kedisiplinan sebagian juru parkir, kurangnya kepatuhan masyarakat, masih adanya parkir liar, dan belum tegasnya penerapan sanksi.

Upaya Pemerintah Kota Sibolga telah dilakukan melalui pembinaan juru parkir, pengawasan lapangan, evaluasi capaian penerimaan, penyesuaian target, pengalihan pengelolaan kepada pihak ketiga, dan rencana penerapan e-parking. Namun, upaya tersebut masih perlu diperkuat melalui pemetaan potensi berbasis data, digitalisasi pembayaran, integrasi pelaporan, pengawasan pihak ketiga, dan penegakan hukum yang konsisten agar retribusi parkir dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap PAD Kota Sibolga.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi yang hanya berfokus pada Kota Sibolga dan objek retribusi parkir tepi jalan umum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif sehingga belum mengukur secara statistik besarnya pengaruh setiap faktor terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir dan PAD.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk menghitung potensi riil retribusi parkir berdasarkan volume kendaraan, tingkat okupansi, jam puncak, tarif, dan lokasi. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan model pengelolaan retribusi parkir antarkota agar diperoleh strategi digitalisasi dan pengawasan yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, Dinas Perhubungan Kota Sibolga, UPTD Perparkiran, juru parkir yang menjadi informan, dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Al Hafiz, M., & Sari, A. G. P. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 11(1). https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4548

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. (2024). Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah serta retribusi daerah Kota Sibolga tahun 2020-2024. BPKPAD Kota Sibolga. https://sibolgakota.go.id/wp-content/uploads/2025/09/22.-LAKIP-BADAN-PENGELOLAAN-KEUANGAN-PENDAPATAN-DAN-ASET-DAERAH.pdf

Dinas Perhubungan Kota Sibolga. (2025). Data ruas jalan pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Sibolga. Dinas Perhubungan Kota Sibolga. https://ppid.sibolgakota.go.id/storage/dokumen/AiIr3DAGPMXJOdsPrJlkde5VT3UEvwbdbljZSXKx.pdf

Eljawati. (2022). Potensi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 9(1), 40-50. https://doi.org/10.33701/jekp.v9i1.2784

Eljawati, & Susilawati. (2023). Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(1). https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3253

Felani, H., & Suryanata, I. P. A. (2023). Implementasi kebijakan e-retribusi pasar tradisional dalam rangka pencegahan kebocoran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabanan. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(1), 106-118. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i1.3097

Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=12002

Inci, E. (2015). A review of the economics of parking. Economics of Transportation, 4(1-2), 50-63. https://doi.org/10.1016/j.ecotra.2014.11.001

Lehner, S., & Peer, S. (2019). The price elasticity of parking: A meta-analysis. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 121, 177-191. https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.01.014

Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. https://slims.pknstan.ac.id/index.php?id=38025&p=show_detail

Maršanić, R. (2025). Economics of digitalization of public roadside parking in city centers. Ekonomski Pregled, 76(3), 225-238. https://doi.org/10.32910/ep.76.3.4

Mo, B., Kong, H., Wang, H., Wang, X. (Cara), & Li, R. (2021). Impact of pricing policy change on on-street parking demand and user satisfaction: A case study in Nanning, China. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 148, 445-469. https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.04.013

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. https://opac.dpr.go.id/index.php?id=13752&keywords=&p=cite

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/303455/perda-kota-sibolga-no-1-tahun-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023

Pierce, G., & Shoup, D. (2013). Getting the prices right: An evaluation of pricing parking by demand in San Francisco. Journal of the American Planning Association, 79(1), 67-81. https://doi.org/10.1080/01944363.2013.787307

Purnomo, R. A., Santoso, A., Astuti, I. P., Aviantoro, D., Juwita, A. H., Zaini, F., & Tomlins, R. (2023). Simulation of public roadside parking tariffs as an effort to elevate regional retribution. Planning Malaysia, 21(25). https://doi.org/10.21837/pm.v21i25.1240

Riswati. (2022). Analisis kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 9(1), 12-22. https://doi.org/10.33701/jekp.v9i1.2780

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. https://perpustakaan.binadarma.ac.id/opac/detail-opac?id=24

Tumija, & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas perencanaan anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(2), 143-157. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3528

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014